

Dampak Implementasi Kebijakan Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Pada Sektor Transportasi

Farida Romaito Pohan¹, Chairul Wafa Al-Farizi²

^{1&2} Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Karya Dharma Merauke, Indonesia

email: ¹ frp.289@gmail.com ² walfarizqiavhizu@gmail.com

(Diterima Juni 2023; Disetujui Agustus 2023; Dipublikasikan September 2023)

Abstrak

Penggunaan bahan bakar minyak (BBM) akan terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia. Keputusan pemerintah untuk membuat kebijakan dan melihat implementasinya di Indonesia. Konsep implementasinya terlihat kompleks dan menantang, melibatkan berbagai tahapan, aktor dan interaksi. Poin-poin penting yang disorot oleh Van Meter dan Van Horn (dalam Dwiyanto Indiahono) adalah Implementasi Kebijakan, Interaksi Aktor, Konteks Lokal, Monitoring dan Evaluasi pada sektor transportasi di Kampus STIA Karya Dharma Merauke. Tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah untuk melihat dampak implementasi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah khususnya di bidang transportasi bagi mahasiswa kampus STIA Karya Dharma Merauke, khususnya bagi mahasiswa yang menggunakan kendaraan sendiri atau pengguna transportasi. Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dan interaksi para aktor sudah berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan standar dan target kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Selama ini belum ada pernyataan langsung dari pemerintah untuk membantu mahasiswa menghadapi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), sehingga diharapkan permasalahan ini dapat segera menjadi bahan pertimbangan pemerintah untuk mencari solusi alternatif dengan memaksimalkan potensi yang ada. sumber daya manusia yang dimiliki oleh Institut. Dalam konteks lokal yang saling terkait dimana politik sangat mempengaruhi keadaan lingkungan sosial di masyarakat dan ekonomi merupakan hal mendasar dalam arti sosial di dalam masyarakat itu sendiri, Monitoring dan Evaluasi yang harus dimiliki oleh lembaga pelaksana kebijakan, antara lain, Demokratis, responsif, transparan, jujur, dan mampu memberikan solusi untuk setiap masalah

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Bahan Bakar Minyak (BBM), Sektor Transportasi

Abstract

The use of fuel oil (BBM) will continue to increase in line with Indonesia's national economic growth. Government decisions to make policies and see their implementation in Indonesia. The concepts of implementation seems complex and challenging, involving various stages, actors and interactions. The important points highlighted by Van Meter and Van Horn (in Dwiyanto Indiahono) are Policy Implementation, Actor Interaction, Local Context, Monitoring and Evaluation in the transportation sector at the STIA Karya Dharma Merauke Campus. The aims that achieved in this study was to see the impact of implementing policies made by the government, especially in the transportation sector for STIA Karya Dharma Merauke campus students, especially for students who use their own vehicles or transportation user. This research method is qualitative research. Data collection techniques used are observation, interview, and documentation techniques. The results of this study indicate that the implementation of the policy and the interaction of actors has been running as it should in accordance with the standards and policy targets set by the government. So far, there has been no direct statement from the government to help students deal with the rising price of fuel oil (BBM), so that it hope this problem can immediately become material for consideration by the government to find alternative solutions by maximizing the potential of human resources owned by the Institute. In local contexts that are interrelated where politics greatly influences the situation of the social environment in society and the economy is fundamental in social terms within the community itself, Monitoring and Evaluation that must owned by the policy implementing agency, including, Democratic, responsive, transparent, honest, and able to provide solutions to each problem

Keywords: Policy Implementation, Fuel Oil), Transportation Sector

PENDAHULUAN

Asumsi tentang kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sangat menentukan APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) 2022 yakni \$63/barel, berbanding terbalik dalam perjalanannya. Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) ini melonjak sangat tinggi terutama karena terjadinya perang di Ukraina serta sanksi terhadap Rusia yang merupakan salah satu produsen minyak dunia. Dengan adanya gejolak tersebut, harga *Indonesia Crude Petroleum (ICP)* meningkat diatas \$100/barel. Sehingga, kenaikan yang jauh di atas asumsi ini menimbulkan suatu tekanan dan pilihan kebijakan bagi pemerintah untuk menetapkan harga ini langsung kepada masyarakat atau ditahan. Sebagai langkah awal, Pemerintah mengambil kebijakan untuk menaikkan anggaran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Dari yang awalnya Rp152 triliun pada APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) 2022 menjadi Rp502,4 triliun sesuai Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022. Artinya, Pemerintah telah menaikkan 3,4 kali lipat dari anggaran awal.

Pemakaian Bahan Bakar Minyak (BBM) akan terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia, Daryanto (2007) dan akan berkurang dari waktu ke waktu sesuai dengan cadangan / persediaan nasional Indonesia kecuali ditemukan sumber cadangan baru ataupun penggunaan energi baru terbarukan. *MOPS (Means Oils of Platts Singapore)* adalah acuan dan pedoman secara internasional yang dipakai oleh hampir di semua Negara Asia Pasifik di dalam menentukan jual-beli / perdagangan minyak bumi dan turunannya di Singapura. Harga Internasional menurut Rober J Dolan & Hermann Simon diaplikasi berbeda dimasing-masing negara, tergantung kepada pasaran setempat, harmonisasi faktor produk sejenis dan juga Kurs mata uang Negara bersangkutan. Walaupun negara Singapura bukan negara besar pengekspor minyak bumi, tetapi karena acuannya sudah dipakai sejak lama, maka itulah yang di pakai. Acuan *MOPS (Means Oils of Platts Singapore)* digunakan di Indonesia sejak 1 April 2001 dengan dasar Keppres No. 45 Tahun 2001 yang dikeluarkan tanggal 29 Maret 2001.

Hal ini menjadi dasar pemerintah membuat kebijakan dan melihat implementasinya di Indonesia. Dampak implementasi kebijakan dapat bervariasi tergantung pada jenis kebijakan yang diterapkan, konteks sosial, ekonomi, politik, dan faktor-faktor lainnya. Menurut Van Meter dan Van Horn (Dalam Dwiyanto Indiahono 2009:38-39). Implementasi kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang untuk menerapkan atau menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan. Dalam konsep ini, implementasi dipandang sebagai proses yang kompleks dan terkadang penuh tantangan, melibatkan berbagai tahapan, aktor, dan interaksi. Beberapa poin penting yang disorot oleh Van Meter dan Van Horn (dalam Dwiyanto Indiahono) yaitu Pelaksanaan Kebijakan, Interaksi Aktor, Konteks Lokal, Pengawasan dan Evaluasi

Van Meter dan Van Horn dalam pandangan mereka tentang implementasi kebijakan meliputi:

1. Pelaksanaan Kebijakan yang implementasi melibatkan proses konkret di mana kebijakan pemerintah atau keputusan resmi dijalankan oleh organisasi atau individu yang berwenang. Ini termasuk tindakan-tindakan nyata yang diambil untuk mencapai tujuan kebijakan;
2. Interaksi Aktor yang implementasinya melibatkan berbagai aktor, termasuk petugas pemerintah, birokrat, organisasi, dan masyarakat sipil. Interaksi antara aktor-aktor ini dapat memengaruhi bagaimana kebijakan diterapkan dan dijalankan;
3. Konteks Lokal yang implementasinya sangat dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, politik, dan ekonomi di tingkat lokal. Faktor-faktor ini dapat memengaruhi bagaimana kebijakan diterima dan dijalankan oleh masyarakat; serta
4. Pengawasan dan Evaluasi yang implementasinya perlu diawasi dan dievaluasi untuk

memastikan bahwa tujuan kebijakan tercapai. Evaluasi dapat mengungkapkan hambatan atau masalah yang muncul selama proses implementasi.

Pandangan Van Meter dan Van Horn tentang implementasi kebijakan menggarisbawahi pentingnya melihat implementasi sebagai proses dinamis yang melibatkan berbagai elemen dan interaksi. Dalam kerangka ini, pemahaman yang mendalam tentang konteks dan dinamika implementasi sangat penting untuk mencapai hasil yang diinginkan dari kebijakan yang telah ditetapkan. Namun realitanya, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dapat memiliki dampak yang luas dan kompleks pada berbagai faktor dalam perekonomian dan masyarakat. Berikut adalah beberapa dampak yang mungkin terjadi akibat kenaikan harga BBM.

1. Inflasi: Kenaikan harga BBM dapat menyebabkan kenaikan biaya produksi dan transportasi, yang pada gilirannya dapat mengakibatkan naiknya harga barang dan jasa secara umum (inflasi). Ini dapat mempengaruhi daya beli konsumen dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan.
2. Biaya Hidup: Harga BBM yang lebih tinggi dapat mengakibatkan naiknya biaya hidup bagi konsumen. Biaya transportasi dan energi rumah tangga dapat meningkat, mempengaruhi belanja bulanan dan kestabilan keuangan rumah tangga.
3. Transportasi dan Mobilitas: Kenaikan harga BBM dapat membuat transportasi lebih mahal, baik itu transportasi umum maupun pribadi. Ini dapat mempengaruhi mobilitas masyarakat, terutama bagi mereka yang bergantung pada transportasi pribadi.
4. Produksi dan Industri: Sektor industri yang sangat tergantung pada energi, seperti sektor manufaktur dan pertanian, mungkin merasakan dampak langsung dari kenaikan harga BBM melalui biaya produksi yang lebih tinggi. Hal ini bisa berdampak pada daya saing dan hasil produksi.
5. Pertumbuhan Ekonomi: Kenaikan harga BBM bisa berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi karena mengurangi daya beli konsumen, meningkatkan biaya produksi, dan merusak investasi dalam berbagai sektor.
6. Kesejahteraan Sosial: Kenaikan harga BBM dapat mendorong meningkatnya kesenjangan sosial karena dampaknya lebih dirasakan oleh kelompok berpendapatan rendah. Kemampuan masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan dan perawatan kesehatan dapat terganggu.
7. Pengangguran: Jika usaha-usaha tertentu mengalami kesulitan akibat kenaikan harga BBM, ini bisa berdampak pada pengurangan tenaga kerja dan potensi peningkatan angka pengangguran.
8. Kebijakan Pemerintah: Kenaikan harga BBM juga dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah terkait subsidi energi, anggaran, dan alokasi dana untuk sektor lain. Pemerintah mungkin harus mengatasi dampak ekonomi dan sosial dari kenaikan harga BBM melalui berbagai kebijakan.
9. Lingkungan: Kenaikan harga BBM dapat mendorong masyarakat untuk mencari alternatif energi yang lebih murah, seperti penggunaan kendaraan bermotor yang lebih efisien atau berpindah ke energi terbarukan. Hal ini dapat memiliki dampak positif pada lingkungan dengan mengurangi emisi gas rumah kaca.
10. Pola Konsumsi: Masyarakat mungkin akan beradaptasi dengan kenaikan harga BBM dengan mengubah pola konsumsi, seperti mengurangi penggunaan kendaraan pribadi atau mencari alternatif transportasi.

Dalam penelitian ini, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dapat memiliki dampak signifikan pada sektor transportasi, yang meliputi transportasi umum, transportasi pribadi, dan mobilitas mahasiswa di Kampus STIA Karya Dharma Merauke. Alasan pemerintah membuat kebijakan menaikkan harga BBM adalah karena 70% subsidi dinikmati oleh masyarakat mampu. Padahal subsidi BBM (Bahan Bakar Minyak) yang diberikan pemerintah cukup dinikmati dan

mempermudah aktivitas mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari. Pemerintah tidak mengeluarkan pernyataan khusus untuk membantu mahasiswa dalam menghadapi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi saat ini. Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) menyebabkan naiknya biaya operasional secara signifikan. Hal berikutnya adalah tarif transportasi umum, gojek dan transportasi lain yang naik secara signifikan. Kondisi mahasiswa yang mayoritas merupakan Orang Asli Papua (OAP) yang harus menggunakan kendaraan umum untuk kuliah, tentunya memberikan dampak yang sangat signifikan pada mobilitas mahasiswa yang berkurang untuk ke kampus atau kerja kelompok diluar rumah karena bergantung pada transportasi umum atau kendaraan pribadi. Hal tersebut di dasari oleh fenomena di Kampus STIA Karya Dharma Merauke yang seluruhnya masih di biyai oleh orang tua di kampung halaman, ataupun menunggu beasiswa sehingga dampak dari implementasi kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada sektor transportasi khususnya perlu di kaji ulang.

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan menggunakan (Sugiyono, 2016). Adapun jenis data yang dipakai adalah data primer dengan menggunakan dokumentasi dan wawancara kepada beberapa informan diantaranya mahasiswa STIA Karya Dharma Merauke (ruang pagi & ruang sore) masing-masing perwakilan dari semester 1, 3, 5 dan 7 sebanyak 6 orang dengan jumlah keseluruhan sebanyak 24 orang. Teknik pengumpulan data yang akan dipergunakan adalah dokumentasi observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang di gunakan adalah model Miles, Huberman (2026), yang mengemukakan bahwa ada tiga aktifitas dalam analisis data yaitu: reduksi data, model data dan penarikan/verifikasi kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari penelitian tentang Dampak Implementasi Kebijakan Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Pada Sektor Transportasi di Kampus STIA Karya Dharma Merauke yang diperoleh oleh penulis dari data hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi pada tanggal 3 September 2022 kemarin menimbulkan berbagai dampak baik itu negatif maupun positif dari masyarakat, dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian kepada mahasiswa kampus STIA Karya Dharma Merauke sebagai informan utama. Peneliti menggunakan model implementasi menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Dwiyanto Indiahono) yaitu Pelaksanaan Kebijakan, Interaksi Aktor, Konteks Lokal, Pengawasan dan Evaluasi

Berdasarkan uraian hasil penelitian di atas dapat di jabarkan bahwa konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) masyarakat Indonesia saat ini tembus Rp.1,2 triliyun setiap harinya. Menteri ESDM Arifin Tasfir menyebutkan bahwa masyarakat Indonesia menghabiskan Bahan Bakar Minyak (BBM) sebanyak 800.000 barel. Saat ini pemerintah terpaksa harus mengimpor minyak mentah dan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk mencukupi kebutuhan negeri sendiri. Pasalnya, sumber minyak di Indonesia umumnya sudah tua sehingga jumlah produksinya menurun, hal ini juga mempengaruhi harga jual Bahan Bakar Minyak (BBM) itu sendiri. Sebelum terjadinya kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) pada tahun 2022 telah terjadi beberapa kali perubahan harga jual Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia.

Adapun data yang peneliti kutip dari CNBCIndonesia.com tentang perubahan harga jual Bahan Bakar Minyak (BBM) yang telah dilakukan oleh pemerintah. Presiden Jokowi pertama kalinya mengumumkan kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) subsidi pada 17 November

2014. Saat itu harga (Bahan Bakar Minyak) BBM subsidi naik Rp 2.000 menjadi Rp 8.500 per liter. Alasan presiden Jokowi menaikkan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) pada waktu itu karena minimnya anggaran infrastruktur dan kesehatan. "Negara membutuhkan anggaran untuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Anggaran ini tidak tersedia karena dihamburkan untuk subsidi BBM," kata Jokowi di Istana Negara, Senin (17/11/2014). Pada 1 Januari 2015, pemerintah memutuskan menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi akibat anjloknya harga minyak dunia. Pengumuman penurunan harga dilakukan pada malam hari. Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Premium saat itu ditetapkan Rp 7.600/liter, turun dari Rp 8.500/liter dan Solar turun menjadi Rp 7.250/liter dari harga sebelumnya Rp 7.500/liter. Penurunan harga BBM ini terjadi seiring dengan melototnya harga minyak dunia. Pemerintah kembali menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium dan Solar sebesar Rp 500/liter mulai Sabtu, 28 Maret 2015 pukul 00.00 WIB. Alasan di balik kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi saat itu yaitu untuk mempertimbangkan dinamika mutakhir harga minyak dunia dan perekonomian nasional. Selang waktu 1 tahun 2 hari, pemerintah kembali memutuskan menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium sebesar Rp 500/liter dari Rp 6.950 menjadi Rp 6.450/lite, harga solar pun ikut turun dengan nominal yang sama. Pengumuman disampaikan Menteri ESDM saat itu Sudirman Said melalui konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 30 Maret 2016 sekitar pukul 4 sore. Saat itu, harga (Bahan Bakar Minyak (BBM) turun seiring turunnya harga minyak mentah dunia. Beberapa tahun kemudian, tepatnya tanggal 10 Oktober 2018 pemerintah kembali mengumumkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Kali ini pemerintah mengumumkan kenaikan di Bali pada sore hari. Namun hanya selang beberapa menit, kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium itu dibatalkan. Menurut Menteri ESDM saat itu, Ignasius Jonan, Pertamina belum siap menaikkan harga Premium. PT Pertamina (Persero) telah menaikkan harga jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) solar nonsubsidi, yakni Pertamina Dex dan Dextrite. Harga terbaru mulai berlaku sejak 1 November 2022. Melansir dari situs resmi Pertamina, Pertamina Dex kini dijual Rp 18.550 dari sebelumnya Rp 18.100. Sementara Dextrite dijual Rp 18.000 dari sebelumnya Rp 17.800, dan Pertamina Turbo dari Rp 14.950 menjadi jadi Rp 14.300. Perubahan harga jual Bahan Bakar Minyak (BBM) tahun 2022 di Indonesia diawali pada tanggal 3 September 2022 dimana presiden Joko Widodo mengumumkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Peralite naik dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter (di kutip dari : Kompas.com). Per 1 November 2022, harga BBM jenis Pertamina Dex (CN 53) naik dari Rp 18.100 per liter menjadi 18.550 per liter. Lalu Dextrite (CN 51) yang melonjak dari Rp 17.800 per liter menjadi Rp 18.000 per liter. Sebaliknya, harga Pertamina Turbo justru mengalami pemangkasan (di kutip dari : Liputan6.com). Ambil contoh di Pulau Jawa, dimana harga BBM jenis RON 98 tersebut turun dari Rp 14.950 per liter menjadi Rp 14.300 per liter.

Terdapat perbedaan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) atau bensin yang berlaku di Jawa dengan wilayah di luar Jawa, termasuk di Papua, Maluku dan sekitarnya, harga Bahan Bakar Minyak (BBM) berlaku di beberapa daerah bisa berbeda karena dipengaruhi perbedaan besaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) di masing-masing daerah. Perubahan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) khususnya jenis Peralite dan Solar berdampak luas ke berbagai sektor perekonomian, mulai dari menaikkan inflasi, memangkas daya beli, menahan pertumbuhan dan pemulihan ekonomi, hingga meningkatkan angka pengangguran dan kemiskinan. Pada sektor ekonomi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) menyebabkan tingkat inflasi naik hingga 6% sehingga berpengaruh terhadap peningkatan suku bunga acuan Bank Indonesia, kenaikan sejumlah harga barang dan jasa, berpengaruh pada pasar saham, dan tarif angkutan umum naik

15%. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Harga Konsumen (IHK) pada September 2022 mengalami inflasi sebesar 1,17% (mtm) setelah pada bulan sebelumnya mengalami deflasi sebesar 0,21% (mtm). Inflasi terutama bersumber dari peningkatan harga kelompok administered prices (harga suatu barang atau jasa di masyarakat berdasarkan aturan pemerintah), di tengah penurunan inflasi inti dan deflasi pada kelompok volatile food (inflasi yang disebabkan kelompok bahan pangan). Dengan perkembangan tersebut, inflasi IHK September 2022 tercatat 5,95% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi pada bulan sebelumnya sebesar 4,69% (yoy). Ke depan, tekanan inflasi IHK diperkirakan meningkat, akibat dampak lanjutan (second round effect) dari penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, menguatnya tekanan inflasi dari sisi permintaan, dan masih tingginya harga energi dan pangan global.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, asumsi harga Bahan Bakar Minyak (BBM) saat menentukan APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) 2022 yakni \$63/barel. Namun dalam perjalanannya, harga Bahan Bakar Minyak (BBM) ini melonjak sangat tinggi terutama karena terjadinya perang di Ukraina serta sanksi terhadap Rusia yang merupakan salah satu produsen minyak dunia. Dengan adanya gejolak tersebut, harga Indonesia Crude Petroleum (ICP) meningkat diatas \$100/barel. Sehingga, kenaikan yang jauh di atas asumsi ini menimbulkan suatu tekanan dan pilihan kebijakan bagi pemerintah untuk menetapkan harga ini langsung kepada masyarakat atau ditahan. Sebagai langkah awal, Pemerintah mengambil kebijakan untuk menaikkan anggaran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Dari yang awalnya Rp152 triliun pada APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) 2022 menjadi Rp502,4 triliun sesuai Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022. Artinya, Pemerintah telah menaikkan 3,4 kali lipat dari anggaran awal.

Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) berdampak kepada masyarakat umum khususnya mahasiswa. Alasan pemerintah menaikkan harga BBM adalah karena 70% subsidi dinikmati oleh masyarakat mampu. Padahal subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diberikan pemerintah cukup dinikmati dan mempermudah aktivitas mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari. Pemerintah tidak mengeluarkan pernyataan khusus untuk membantu mahasiswa dalam kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) ini. Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) juga disusul dengan kenaikan harga barang pokok, naiknya tarif angkutan umum, naiknya tarif ojek online, sementara pemasukan orang tua yang bekerja tidak mengalami kenaikan bahkan mungkin ada yang tidak menentu dan gaji orang tua yang bekerja kantoran tidak mengalami kenaikan. Tentunya hal ini akan membuat pengeluaran keluarga dan mahasiswa bertambah.

Pada Indikator pertama yaitu Pelaksanaan Kebijakan dapat di definisikan sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian implementasi dalam mewujudkan sasaran dan tujuan suatu kebijakan, baik itu berupa keluaran kebijakan (policy output), maupun hasil kebijakan (*policy outcome*). Pada penelitian ini, peneliti mengumpulkan informasi dari para mahasiswa dengan pertanyaan tentang kinerja badan pelaksana dalam pengimplementasian kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah guna mewujudkan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil wawancara kepada mahasiswa, peneliti mengkaji data yang di dapat berdasarkan indikator Kinerja Kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Dwiyanto Indiahono) yaitu penilaian terhadap sasaran kebijakan dalam implementasi suatu aturan yang kemudian peneliti rangkum menjadi sebuah pertanyaan sehingga peneliti mendapatkan berbagai pendapat dari kondisi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi saat ini. Menurut sebagian besar informan, implementasinya sejauh ini berjalan baik. Lima orang informan berpendapat bahwa setiap aturan yang telah di buat oleh pemerintah sudah dengan berbagai pertimbangan dan sudah

di fikirkan dengan seksama dampak, sebab, akibat, dan seperti apa implementasi kebijakannya di kemudian hari. Namun ada juga salah satu informan yang berpendapat bahwa implementasi kebijakan belum berjalan dengan baik, karena dampak yang di timbulkan tidak di imbangi dengan solusi yang di berikan oleh pemerintah kepada masyarakat khususnya mahasiswa.

Pada Indikator ke dua yaitu Interaksi Aktor menunjuk kepada seberapa besar dukungan finansial, ketersediaan sumber daya pendukung dan sumber daya manusia yang mumpuni untuk melaksanakan program atau kebijakan yang telah dibuat. Hal sulit yang terjadi adalah berapa nilai sumber daya (baik finansial maupun manusia) untuk menghasilkan implementasi kebijakan dengan kinerja baik. Evaluasi program/ kebijakan seharusnya dapat menjelaskan nilai yang efisien. Peneliti mengkaji data yang di dapat berdasarkan indikator Sumber Daya menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Dwiyanto Indiahono), mahasiswa informan berpendapat bahwa pasokan ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) sejauh ini memang semakin mengalami pengurangan volume ketersediaan dari tahun ke tahun. Informan berpendapat bahwa ketersediaan Bahan Bakar yang semakin lama semakin berkurang menjadi salah satu alasan mengapa harga Bahan Bakar Minyak di naikkan oleh pemerintah. Berdasarkan pemaparan yang telah di sampaikan para informan, faktor yang mempengaruhi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah berkurangnya ketersediaan sumber daya minyak. Informan berpendapat bahwa sejauh ini belum ada pernyataan langsung dari pemerintah dalam membantu mahasiswa menghadapi kondisi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi saat ini sehingga informan berharap permasalahan ini dapat di carikan solusi alternatif oleh pemerintah dengan memaksimalkan potensi sumber daya manusia yang saat ini dimiliki oleh badan pelaksana kebijakan dengan harapan mampu untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Adapun indikator ke tiga, yaitu Konteks Lokal. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik menunjuk bahwa lingkungan dalam ranah implementasi dapat mempengaruhi kesuksesan implementasi kebijakan itu sendiri. Lingkungan ekonomi adalah lingkungan manusia dalam hubungan dengan sesamanya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Lingkungan sosial budaya adalah segala kondisi, baik berupa materi (benda) maupun non materi yang dihasilkan oleh manusia melalui aktifitas dan kreativitasnya. Politik adalah segala kondisi yang menjadi tolak ukur dalam pengambilan keputusan dan membuat kebijakan demi mencapai tujuan yang telah di tetapkan.

Proses hubungan kualitas lingkungan hidup dalam sosial ekonomi adalah keterkaitan antara baik buruknya kualitas lingkungan hidup dalam menunjang jalannya aktivitas sosial ekonomi di tengah masyarakat. Lingkungan hidup yang baik akan berdampak positif bagi aspek sosial ekonomi dan begitu pun sebaliknya. Sedangkan, Lingkungan politik terdiri dari hukum, badan pemerintah, dan kelompok LSM yang mempengaruhi atau membatasi berbagai organisasi dan individu di dalam masyarakat tertentu.

Berdasarkan hasil wawancara kepada mahasiswa serta di kaitkan dengan teori Van Meter dan Van Horn, informan berpendapat bahwa sosial ekonomi dan politik merupakan hal yang saling berkaitan dimana politik merupakan penentu keputusan dalam membuat kebijakan agar tercapainya suatu tujuan sangat mempengaruhi situasi lingkungan sosial bermasyarakat dimana akan menimbulkan berbagai spekulasi pro dan kontra sehingga berpengaruh terhadap perekonomian merupakan hal yang fundamental dalam sosial, di mana ekonomi pada dasarnya bersifat finansial yang menjadi pondasi dasar untuk pemenuhan kebutuhan biaya hidup dalam lingkup sosial masyarakat. Dalam hal ini, apabila di kaitkan pada realita yang terjadi saat ini maka dapat kita ketahui bahwa implementasi kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) berdampak terhadap lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Dari berbagai pernyataan yang telah

di sampaikan informan dalam wawancara yang peneliti lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik saling berkaitan dan berdampak terhadap implementasi kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi saat ini.

Indikator yang ke empat yaitu Pengawasan dan Evaluasi merupakan variabel penting dalam penentu implementasi kebijakan. Sikap pelaksana merupakan tolak ukur seberapa demokratis, antusias dan responsif badan pelaksana kebijakan terhadap kelompok sasaran dan lingkungan. Berdasarkan hasil wawancara kepada mahasiswa serta di kaitkan dengan teori Van Meter dan Van Horn, informan berpendapat bahwa pemerintah dalam menyikapi setiap permasalahan yang beredar dalam masyarakat diharapkan memiliki beberapa karakteristik antara lain , mau mendengarkan aspirasi masyarakat agar badan pelaksana dapat mengetahui situasi yang saat ini di hadapi masyarakat , membuat forum diskusi dengan melibatkan mahasiswa dan berbagai pihak sebelum menetapkan kebijakan hal ini bertujuan agar mahasiswa sebagai penyambung lidah masyarakat dapat memberikan saran dan masukan yang kemudian dapat menjadi pertimbangan pemerintah sebelum membuat kebijakan, jujur serta terbuka dan transparan dalam setiap informasi yang ada maupun dalam implementasi kebijakan, responsif terhadap keluhan masyarakat sehingga dapat dengan sigap dan cepat mampu memberikan solusi alternatif terhadap setiap permasalahan khususnya dampak implementasi dari kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi saat ini. Dari hasil wawancara dengan informan, peneliti menyimpulkan bahwa karakteristik yang harus di miliki badan pelaksana kebijakan antara lain, Demokratis, responsif, transparan, jujur, dan mampu memberikan solusi dari tiap permasalahan yang terjadi. Selain itu juga adanya upaya evaluasi sangat berpengaruh terhadap implementasi kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi saat ini.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada informan dengan menggunakan model implementasi menurut Van Meter dan Van Horn serta di kaitkan dengan realita yang terjadi saat ini, dapat di ketahui bahwa kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di pengaruhi oleh faktor kelangkaan di mana ketersediaan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) dari tahun ke tahun di sinyalir semakin mengalami pengurangan volume akibat dari penggunaan oleh kendaraan bermotor, dan juga subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) juga nilai tidak tepat sasaran karena masyarakat yang mampu juga ikut menikmati, dari kebijakan menaikkan harga jual Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut di rasa lebih banyak menimbulkan dampak negatif daripada positif dalam pengeluaran finansial untuk pemenuhan biaya kebutuhan hidup di karenakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) berimbas pada semakin naiknya harga jual barang dan jasa, serta juga berimbas pada semakin naiknya biaya jasa transportasi, sehingga hal ini di rasa sangat memberatkan oleh mahasiswa.

PENUTUP

Dari hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Kebijakan dalam implementasinya sejauh ini berjalan dengan sebagai mana mestinya sesuai dengan standar dan sasaran kebijakan yang telah di tetapkan oleh pemerintah dalam situasi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi saat ini. Begitupun dalam hal Interaksi Aktor dalam pengimplementasian kebijakan, peneliti menyimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah berkurangnya ketersediaan sumber daya minyak. Hingga sejauh ini belum ada pernyataan langsung dari pemerintah dalam membantu mahasiswa menghadapi kondisi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi saat ini sehingga di harapkan permasalahan ini dapat di carikan solusi alternatif oleh pemerintah dengan memaksimalkan potensi sumber daya manusia yang saat ini dimiliki oleh

badan pelaksana kebijakan dengan harapan mampu untuk mengatasi permasalahan tersebut. Konteks Lokal yang merupakan hal yang saling berkaitan dimana politik sangat mempengaruhi situasi lingkungan sosial bermasyarakat dan perekonomian merupakan hal yang fundamental dalam sosial di dalam masyarakat itu sendiri. Serta Pengawasan dan Evaluasi yang harus di miliki badan pelaksana kebijakan antara lain, Demokratis, responsif, transparan, jujur, dan mampu memberikan solusi dari tiap permasalahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Akib, Haedar. 2010. *Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana*. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*. Volume 1 No.1. Universitas Negeri Makassar
- Dwiyanto Indiahono, 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2009
- Madani, Muhlis.2011. *Dimensi Interaksi Aktor Dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mustari, Nuryanti.2013. *Implementasi Kebijakan Publik Pemahaman Teoritis Empiris*. Makassar: Membumi Publishing.
- Nugroho, Riant.2012. *Public Policy Teori Kebijakan, Analisis Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi,Revisi Risk Management Dalam Kebijakan Publik,Kebijakan Sebagai The Fifth Estate Metode Penelitian Kebijakan Publik*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuanlitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Wahab, S, Abdul. 2002. *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara
- Widodo, Solichin. 2011. *Analisis Kebijakan dan Formulasi ke Implementasi Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak
- Keputusan Menteri ESDM Nomor 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan.